

Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Bencana Untuk Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pasca Banjir (Studi Kasus Di Desa Balongga, Kecamatan Dolo Selatan)

Effectiveness of Disaster Relief Fund Distribution for Post-Flood Community Economic Recovery (Case Study in Balongga Village, Dolo Selatan District)

Komang Krisna Yuda^{1*}, Dini Rosyada², Fitriana³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Abdul Azis Lamadjido

***Corresponding Author: E-mail: komangkrisnayudaa@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyaluran dana bantuan pasca bencana banjir oleh Pemerintah Desa Balongga dan menganalisis efektivitas penyaluran dana bantuan bencana dalam program pemulihan ekonomi masyarakat pasca banjir bandang yang melanda Desa Balongga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Mekanisme penyaluran dana bantuan dilakukan melalui lima tahapan, yaitu penetapan status keadaan darurat dan realokasi APBDDes, pendataan korban secara langsung ke warga terdampak, koordinasi lintas instansi dalam pola *multi-level governance*, distribusi bantuan logistik, serta penanganan hambatan program pemulihan jangka panjang. (2) Efektivitas penyaluran dana bantuan menunjukkan profil yang tidak seragam. Dari indikator pencapaian tujuan, program dinilai cukup efektif untuk pemenuhan kebutuhan logistik jangka pendek, namun belum optimal untuk kebutuhan mendasar terutama akses air bersih. Dari indikator integrasi, koordinasi vertikal antar instansi pemerintah berjalan cukup baik pada fase tanggap darurat, namun integrasi horizontal antara pemerintah desa dan masyarakat terdampak sangat lemah, ditandai dengan tidak dilibatkannya masyarakat dalam musyawarah. Dari indikator adaptasi, program menunjukkan kapasitas adaptif yang cukup baik, tercermin dari sinkronisasi kebijakan kecamatan di lapangan serta keterlibatan *Non-Governmental Organisation (NGO)*. Secara keseluruhan, efektivitas penyaluran dana bantuan bencana di Desa Balongga belum berjalan secara optimal karena terdapat kesenjangan antara jenis bantuan yang disalurkan dengan kebutuhan riil masyarakat, lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, serta belum terealisasinya program relokasi jangka panjang bagi warga di zona merah.

Kata kunci : Efektivitas, Dana Bantuan Bencana, Pemulihan Ekonomi, Pasca Banjir, Pemerintah Desa.

ABSTRACT

This study aims to analyze the mechanism of post-flood relief fund distribution by the Balongga Village Government and analyze the effectiveness of disaster relief fund distribution in the community economic recovery program after the flash flood that hit Balongga Village. This study uses a descriptive qualitative approach. The results of the study show that: (1) The mechanism of relief fund distribution is carried out

through five stages, namely determining the emergency status and reallocation of the Village Budget, direct victim data collection to affected residents, cross-agency coordination in a multi-level governance pattern, distribution of logistical assistance, and handling obstacles to the long-term recovery program. (2) The effectiveness of relief fund distribution shows a non-uniform profile. Based on the goal achievement indicators, the program is considered quite effective in meeting short-term logistical needs, but not optimal for basic needs, especially access to clean water. Based on the integration indicator, vertical coordination between government agencies ran quite well during the emergency response phase, but horizontal integration between village governments and affected communities was very weak, indicated by the community's non-involvement in deliberations. Based on the adaptation indicator, the program demonstrated quite good adaptive capacity, reflected in the synchronization of sub-district policies in the field and the involvement of Non-Governmental Organisation (NGO). Overall, the effectiveness of disaster relief funds distribution in Balongga Village has not been optimal due to a gap between the type of aid distributed and the community's actual needs, weak community participation in the planning process, and the unrealized long-term relocation program for residents in the red zone.

Keywords: *Effectiveness, Disaster Relief Funds, Post-Flood Economic Recovery, Village Government*

PENDAHULUAN

Banjir merupakan salah satu bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi di Indonesia dan berdampak langsung terhadap keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dampak banjir tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik seperti rumah dan infrastruktur, tetapi juga mengganggu mata pencaharian, akses terhadap kebutuhan dasar, serta stabilitas psikologis masyarakat terdampak. Dalam konteks wilayah pedesaan, bencana banjir sering memperparah kerentanan ekonomi karena sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perdagangan kecil, dan usaha informal yang sangat sensitif terhadap gangguan lingkungan.

Banjir bandang yang melanda Desa Balongga pada 17 April 2024 menimbulkan dampak kerusakan yang cukup signifikan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sigi menunjukkan bahwa sebanyak 73 unit rumah warga mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan yang bervariasi, bahkan 9 unit rumah dinyatakan tidak layak huni dan 1 unit rumah hanyut tersapu arus banjir. Jumlah penduduk terdampak tercatat sebanyak 113 kepala keluarga (KK) atau sekitar 384 jiwa, yang tersebar di dua dusun. Kerusakan fisik tersebut berdampak langsung terhadap terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat, terutama sektor pertanian, perdagangan kecil, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti akses air bersih dan hunian layak. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Pemerintah Desa Balongga menyalurkan dana bantuan yang bersumber dari anggaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan darurat masyarakat, seperti bantuan logistik, perbaikan sementara hunian, serta dukungan awal pemulihan ekonomi. Hasil survei awal dengan warga menunjukkan bahwa jumlah bantuan yang diterima dinilai belum memadai dan belum sepenuhnya merata, serta belum sepenuhnya menjawab kebutuhan prioritas masyarakat terdampak. Sebagian warga menyampaikan bahwa akses air bersih justru menjadi kebutuhan utama yang belum tertangani secara optimal, sementara bantuan lebih banyak difokuskan pada logistik jangka pendek.

Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik Dan Persandian (PIKP) jenis bantuan logistik yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk warga terdampak banjir berupa gula sebanyak 200kg, ikan kaleng 400kg, teh celup 100 kotak, mie instan 15 dos, saus sambal 50 bungkus dan air mineral 20 dos (Diskominfo 2024). Selain itu, beberapa program pemulihan yang direncanakan, seperti pembangunan hunian pascabencana dan relokasi warga di bantaran sungai, hingga saat ini belum terealisasi secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat tantangan dalam efektivitas alokasi dana bantuan, baik dari sisi ketepatan sasaran, kesesuaian kebutuhan, maupun keberlanjutan program pemulihan ekonomi masyarakat. Data empiris ini memperkuat urgensi perlunya kajian mendalam untuk memahami bagaimana mekanisme penyaluran dana bantuan dan strategi pemerintah desa benar-benar bekerja dalam konteks lokal Desa Balongga.

Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengelola dana desa yang bersumber dari APBN dan APBD, termasuk alokasi khusus untuk penanganan keadaan darurat dan pemulihan pascabencana. Dana bantuan tersebut diarahkan untuk mendukung pemulihan infrastruktur dasar, pemulihan usaha produktif, penyediaan logistik, serta peningkatan kapasitas masyarakat. Berbagai kebijakan nasional menekankan pentingnya pengelolaan dana bantuan yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat terdampak. Namun, keterbatasan anggaran, kompleksitas mekanisme birokrasi, serta variasi kapasitas pengelolaan di tingkat desa sering menjadi tantangan dalam implementasi program pemulihan. Temuan awal di Desa Balongga menunjukkan bahwa distribusi bantuan belum sepenuhnya merata, sebagian program belum terealisasi sesuai rencana, serta mekanisme pelibatan masyarakat masih terbatas. Data empiris ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap efektivitas alokasi dana bantuan serta strategi pemerintah desa dalam program pemulihan ekonomi pasca bencana.

Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai pemulihan pascabencana cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif dengan fokus pada pengukuran capaian numerik, seperti tingkat realisasi anggaran, persentase peningkatan pendapatan, atau indikator keberhasilan program. Pendekatan tersebut memberikan gambaran makro mengenai kinerja program, namun belum sepenuhnya mampu menjelaskan bagaimana kebijakan dan bantuan tersebut dialami, dimaknai, dan dirasakan oleh masyarakat sebagai subjek utama pemulihan. Selain itu, penelitian sebelumnya umumnya belum menggali secara mendalam dinamika sosial, persepsi masyarakat, relasi kekuasaan, serta proses pengambilan keputusan di tingkat desa yang memengaruhi efektivitas implementasi program. Keterbatasan ini menyebabkan pemahaman tentang realitas pemulihan ekonomi pascabencana di tingkat lokal masih bersifat parsial dan kurang kontekstual.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena secara mendalam dan apa adanya menggunakan data non-numerik seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman hidup masyarakat, memahami makna yang mereka berikan terhadap bantuan dan program pemulihan, serta mengeksplorasi dinamika sosial dan proses-proses yang terjadi di lapangan dengan cara yang holistik dan kontekstual.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis secara mendalam persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap alokasi dana bantuan, serta strategi dan praktik pemerintah desa dalam melaksanakan program pemulihan ekonomi pascabencana. Penelitian ini tidak hanya menilai efektivitas dari sisi capaian program, tetapi juga mengungkap makna sosial, pengalaman subjektif, serta dinamika relasi antara pemerintah desa dan masyarakat terdampak. Dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama penelitian, studi ini diharapkan mampu menghadirkan perspektif lokal yang lebih autentik dan memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai proses pemulihan ekonomi di tingkat desa.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2019:206) metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

Jenis penelitian deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, faktual, dan mendalam mengenai persepsi serta pengalaman masyarakat Desa Balongga terhadap penyaluran dana bantuan bencana, serta upaya dan strategi Pemerintah Desa Balongga dalam melaksanakan program pemulihan ekonomi masyarakat pasca banjir.

Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih objek penelitian di Desa Balongga, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2025 sampai Maret 2026. Peneliti

mengambil lokasi tersebut karena untuk mengkaji lebih dalam mengenai Efektivitas penyaluran Dana Bantuan bencana Dan Upaya Pemerintah Desa Dalam Program Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pasca Banjir.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, faktual, dan mendalam mengenai persepsi serta pengalaman masyarakat. Proses analisis data mengadopsi model Miles Dan Huberman (2014) yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Pasca Bencana Banjir Oleh Pemerintah Desa

Balongga

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran dana bantuan pascabencana banjir bandang di Desa Balongga pada tahun 2024 berlangsung melalui serangkaian tahapan yang bersifat bertahap dan melibatkan berbagai sektor kelembagaan secara vertikal, mulai dari tingkat desa, kecamatan, BPBD, hingga pemerintah kabupaten. Mekanisme ini dimulai dari penetapan status keadaan darurat sebagai dasar administratif yang memungkinkan pemerintah desa untuk melakukan realokasi anggaran melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Proses realokasi tersebut dilakukan melalui musyawarah desa khusus yang melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perwakilan tokoh masyarakat. Temuan ini sejalan dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur bahwa daerah rawan bencana diwajibkan mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam APBDes setiap tahun anggaran.

Dalam hal sumber dan bentuk dana bantuan, penelitian ini menemukan bahwa dana bantuan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan tidak disalurkan dalam bentuk uang tunai, melainkan dikonversi menjadi paket sembako dan logistik. Kebijakan ini mencerminkan orientasi penanganan bencana pada tahap tanggap darurat yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pangan dasar jangka pendek. Temuan ini sejalan dengan konsep Dana Tanggap Darurat yang dikemukakan dalam tinjauan teori, di mana dana tersebut bersifat cepat dan fleksibel untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat. Namun demikian, jika dibandingkan dengan konsep pemulihan ekonomi pasca banjir yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2018), yang menekankan bahwa dana bantuan pemulihan ekonomi harus dirancang secara komprehensif mencakup rehabilitasi fisik, modal kerja, dan pelatihan kewirausahaan, maka jenis bantuan logistik yang disalurkan di Desa Balongga masih berada pada tahap yang sangat awal dari spektrum pemulihan ekonomi yang diharapkan.

Mengenai proses pendataan dan penetapan kriteria penerima bantuan, penelitian ini menemukan bahwa pendataan dilakukan oleh Kepala Dusun Bersama Aparat Desa melalui kunjungan langsung ke rumah warga, dengan kriteria yang membagi penerima menjadi dua kategori utama, yaitu kerusakan berat dan kerusakan ringan. Prioritas diberikan kepada warga dengan tingkat kerusakan berat, termasuk rumah yang hanyut atau tidak layak huni. Sistem dua kriteria ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan distributif dalam penyaluran bantuan, di mana kelompok yang paling rentan mendapatkan akses pertama terhadap sumber daya yang terbatas. Dari perspektif manajemen bencana yang dikemukakan oleh Nurjanah (2013), proses pendataan yang sistematis merupakan komponen penting dalam fase pascabencana karena menjadi dasar bagi seluruh mekanisme rehabilitasi dan rekonstruksi. Penetapan kriteria yang terstruktur ini juga mencerminkan adanya upaya menuju prinsip akuntabilitas sebagaimana yang ditekankan oleh Mardiasmo (2018), yaitu pertanggungjawaban pengelolaan dana kepada pemangku kepentingan melalui dokumentasi yang lengkap dan mekanisme pelaporan yang jelas.

Dalam aspek koordinasi lintas aktor kelembagaan, penelitian ini menemukan bahwa penyaluran bantuan melibatkan koordinasi lintas sektor yang mencakup Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, BPBD, BAPPEDA, dan Pemerintah Daerah. Pola koordinasi yang terbentuk mencerminkan karakteristik tata kelola bencana berbasis *multi-level governance*, di mana setiap tingkatan pemerintahan memiliki peran

dan kewenangan yang berbeda namun saling melengkapi. BPBD berfungsi sebagai penanganan tanggap darurat, sementara perencanaan pemulihan jangka menengah dan panjang menjadi kewenangan BAPPEDA. Pemerintah kecamatan berperan dalam pengawasan ketepatan sasaran distribusi bantuan. Temuan ini relevan dengan tahapan manajemen bencana yang dikemukakan Ramli (2010), yang membagi penanganan bencana menjadi tiga tahap utama, yaitu pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana, dengan setiap tahap melibatkan peran aktor yang berbeda. Pembagian fungsi yang jelas antara BPBD dan BAPPEDA juga merupakan bentuk operasionalisasi prinsip manajemen bencana yang komprehensif, di mana fungsi tanggap darurat dan perencanaan pemulihan jangka panjang dikelola secara terpisah oleh institusi yang memiliki kapasitas teknis yang sesuai.

Pada tahap distribusi bantuan bencana, penelitian ini mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan antara *supply-side* (jenis bantuan yang disediakan berupa logistik) dengan *demand-side* (kebutuhan prioritas masyarakat berupa akses air bersih). Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme *needs assessment* sebelum dan sesaat setelah terjadinya bencana belum berjalan secara optimal. Kondisi ini berimplikasi langsung terhadap efektivitas program pemulihan karena ketidaksesuaian jenis bantuan dengan kebutuhan riil masyarakat akan mengurangi dampak nyata dari bantuan tersebut. Dari perspektif prinsip efektivitas dana bantuan yang dikemukakan Mardiasmo (2018), efektivitas mensyaratkan kesesuaian antara tujuan penggunaan dana dengan hasil yang diharapkan, yaitu pemulihan ekonomi masyarakat secara optimal. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun aspek transparansi dan akuntabilitas administratif telah terpenuhi melalui sistem pendataan dan koordinasi lintas instansi, aspek efektivitas substantif dalam hal kesesuaian bantuan dengan kebutuhan nyata masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Terkait hambatan dalam penyaluran dan pemulihan ekonomi pasca bencana, penelitian ini menemukan tiga hambatan utama yang saling berkaitan, yaitu: (1) keterlambatan realisasi program relokasi bagi warga di zona merah; (2) kesenjangan antara jenis bantuan yang disalurkan dengan kebutuhan riil masyarakat terdampak (*supply-demand gap*); dan (3) keterbatasan kapasitas pemerintah desa dalam mendorong percepatan program yang kewenangannya berada di tingkat kabupaten. Pertama, program relokasi yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk memindahkan sekitar 15 kepala keluarga yang bermukim di zona merah bantaran sungai ke kawasan yang lebih aman, hingga saat penelitian dilakukan belum menunjukkan realisasi yang nyata. Sebagaimana disampaikan Kepala Desa Balongga, Bapak Akbar, bahwa hingga saat ini masih belum ada kejelasan terkait program tersebut. Keterlambatan ini mencerminkan adanya *implementation gap* yang signifikan antara kebijakan yang direncanakan di tingkat kabupaten dengan pelaksanaan di lapangan, yang kemungkinan disebabkan oleh kompleksitas prosedur perencanaan, keterbatasan anggaran, maupun lemahnya sinkronisasi antara BPBD dan BAPPEDA dalam merealisasikan program pemulihan jangka panjang. Temuan ini sejalan dengan penelitian Islami et al. (2025) yang menemukan bahwa ketepatan waktu pelaksanaan program pemulihan belum efektif akibat keterlambatan realisasi yang disebabkan oleh keterbatasan dana dan kompleksitas prosedur perencanaan. Secara teoritis, kondisi ini menunjukkan bahwa proses manajemen bencana pada fase pasca bencana, khususnya tahapan rekonstruksi yang meliputi pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, masih belum berjalan secara optimal di tingkat lokal akibat kendala struktural dan anggaran. Kedua, terdapat kesenjangan antara jenis bantuan yang disalurkan dengan kebutuhan riil masyarakat terdampak. Bantuan yang disalurkan pemerintah sepenuhnya berbentuk logistik berupa sembako, sementara kebutuhan paling mendesak yang dirasakan masyarakat justru adalah akses air bersih. Hal ini dikuatkan oleh keterangan Ibu Minarni selaku warga terdampak yang menyatakan bahwa meskipun kebutuhan rumah tangga sehari-hari cukup terpenuhi, permasalahan terberat yang dihadapi adalah keterbatasan ketersediaan air bersih, termasuk bantuan air bersih dari pemerintah yang dirasakan masih belum mencukupi. Demikian pula Bapak Irfan selaku warga terdampak yang menegaskan bahwa bantuan yang diterima belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya karena tidak menjawab kebutuhan prioritas berupa sumber air bersih. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya mekanisme *needs assessment* sebelum dan sesaat setelah terjadinya bencana, sehingga jenis bantuan ditetapkan secara sepihak berdasarkan standar logistik pemerintah tanpa mengintegrasikan perspektif dan kebutuhan riil masyarakat sebagai penerima manfaat. Dari perspektif prinsip efektivitas yang dikemukakan Mardiasmo (2018), efektivitas mensyaratkan kesesuaian antara tujuan penggunaan dana dengan hasil yang diharapkan, yaitu

pemulihan ekonomi masyarakat secara optimal. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa aspek efektivitas substantif dalam hal kesesuaian bantuan dengan kebutuhan nyata masyarakat masih perlu ditingkatkan. Ketiga, keterbatasan kapasitas pemerintah desa dalam mendorong percepatan realisasi program yang kewenangannya berada di tingkat kabupaten menjadi hambatan struktural yang signifikan. Sebagaimana diungkapkan oleh BPBD Kabupaten Sigi bahwa perencanaan pemulihan sepenuhnya terpusat di BAPPEDA, sementara BPBD hanya menangani tanggap darurat. Kondisi ini menempatkan pemerintah desa dalam posisi yang terbatas untuk mendorong percepatan program relokasi maupun program pemulihan jangka panjang lainnya yang secara hierarkis berada di luar kewenangannya. Ketiga hambatan ini secara bersama-sama menggambarkan bahwa meskipun mekanisme penyaluran bantuan pada tahap tanggap darurat telah berjalan dengan cukup baik melalui koordinasi lintas instansi yang responsif, terdapat kelemahan mendasar pada aspek perencanaan kebutuhan dan implementasi program pemulihan jangka panjang yang perlu menjadi perhatian serius bagi seluruh pemangku kepentingan dalam tata kelola bencana di Desa Balongga.

Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Bencana Untuk Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pasca Banjir

Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*)

Berdasarkan temuan penelitian, indikator pencapaian tujuan dalam program penyaluran dana bantuan bencana di Desa Balongga menunjukkan hasil yang bersifat parsial. Dari sisi pemenuhan kebutuhan logistik jangka pendek, bantuan yang disalurkan telah berkontribusi dalam menstabilkan kondisi ekonomi rumah tangga masyarakat terdampak, sebagaimana dikonfirmasi oleh warga bahwa kondisi ekonomi mereka cukup stabil atas bantuan yang diberikan. Program normalisasi kawasan sungai dan penghijauan yang melibatkan Kelompok Siaga Bencana (KSB) dan forum kebencanaan kecamatan juga berkontribusi pada pemulihan lingkungan sebagai prasyarat bagi pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Namun demikian, terdapat kesenjangan signifikan dalam pencapaian tujuan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan prioritas masyarakat, khususnya akses air bersih yang merupakan kebutuhan paling mendasar pascabencana. Meskipun pihak kecamatan menyatakan bahwa bantuan air bersih telah berkontribusi nyata, masyarakat terdampak menyatakan bahwa pasokan tersebut belum mencukupi kebutuhan mereka secara memadai. Kesenjangan persepsi ini penting karena mengindikasikan bahwa penilaian keberhasilan dari sisi pemerintah belum sepenuhnya mencerminkan realitas yang dirasakan oleh masyarakat. Temuan ini bersesuaian dengan pemikiran Steers (2013) yang menegaskan bahwa efektivitas tidak hanya terletak pada terlaksananya kegiatan, tetapi pada ketercapaian hasil dan dampak yang diharapkan oleh kelompok sasaran. Dengan demikian, dari perspektif pencapaian tujuan, program bantuan bencana di Desa Balongga dapat dikategorikan cukup efektif untuk kebutuhan logistik jangka pendek dan pemulihan lingkungan, namun belum efektif optimal untuk kebutuhan mendasar yang bersifat berkelanjutan seperti akses air bersih. Kondisi ini sejalan dengan temuan Rochmansjah (2021) bahwa program pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah desa masih belum memberikan hasil yang maksimal karena belum semua kebutuhan prioritas masyarakat terpenuhi secara merata.

Integrasi (*Integration*)

Pada indikator integrasi, penelitian ini mengungkapkan dua wajah integrasi yang berbeda secara signifikan. Di satu sisi, integrasi vertikal antar instansi pemerintah berjalan dengan cukup baik, yang tercermin dari respons koordinasi yang cepat dan responsif antara kecamatan, BPBD, dan pemerintah daerah pada fase tanggap darurat. Musyawarah desa yang melibatkan BPD, tokoh masyarakat, dan aparat desa juga mencerminkan adanya upaya membangun legitimasi keputusan melalui pendekatan partisipatif formal. Hal ini sesuai dengan elemen integrasi dalam teori Steers (2013) yang menekankan pentingnya kualitas komunikasi antar pelaksana program dan intensitas koordinasi kelembagaan.

Di sisi lain, integrasi horizontal antara pemerintah desa dengan masyarakat terdampak justru menunjukkan kelemahan yang mendasar. Temuan kritis penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat terdampak tidak dilibatkan secara langsung dalam musyawarah perencanaan pemulihan, dan inisiatif mandiri

masyarakat dalam membentuk posko justru mendapat respons yang kurang kooperatif dari pemerintah desa. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan relasi antara pemerintah desa dan masyarakat yang berpotensi menghambat efektivitas program pemulihan secara keseluruhan. Dari perspektif teoritis, kondisi ini bertentangan dengan prinsip partisipasi masyarakat yang ditekankan oleh Putra dan Rasmini (2019) yang menemukan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana. Temuan ini juga bersesuaian dengan penelitian Hakim et al. (2022) yang menegaskan bahwa pemulihan ekonomi pasca bencana memerlukan keterlibatan multi aktor secara kemitraan, bukan sekadar koordinasi *top-down* antar instansi pemerintah. Dengan demikian, dari indikator integrasi, efektivitas program pemulihan ekonomi di Desa Balongga belum optimal karena partisipasi masyarakat sebagai aktor utama pemulihan masih sangat terbatas dan terdapat indikasi ketegangan relasional yang dapat menghambat sinergi antara program pemerintah dengan inisiatif masyarakat.

Adaptasi (*Adaptation*)

Pada indikator adaptasi, program pemulihan ekonomi di Desa Balongga menunjukkan kapasitas yang lebih baik dibandingkan dua indikator sebelumnya. Temuan penelitian mengungkapkan adanya mekanisme sinkronisasi kebijakan antara tingkat kecamatan dengan pelaksanaan di lapangan yang memastikan program tetap relevan dengan kondisi nyata. Keterlibatan pihak *Non-Governmental Organisation (NGO)* sebagai mitra kecamatan dalam program pembibitan pohon merupakan bentuk adaptasi kelembagaan yang signifikan, di mana pemerintah tidak hanya mengandalkan sumber daya internal tetapi juga membuka ruang bagi aktor eksternal untuk berkontribusi dalam pemulihan ekonomi berbasis lingkungan. Kolaborasi dengan *Non-Governmental Organisation (NGO)* ini mencerminkan kapasitas adaptif pemerintah kecamatan dalam memanfaatkan sumber daya di luar jalur birokrasi formal untuk mempercepat pemulihan, yang sejalan dengan konsep Program Pemulihan Pemerintah Desa yang menekankan pentingnya pendekatan multi-aktor dan kemitraan sebagaimana diuraikan dalam Kemenko PMK (2018).

Program-program adaptif yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten, mencakup pembangunan tanggul di sekitar sungai, penanaman pohon, dan sosialisasi kesiapsiagaan bencana, telah dirasakan dampaknya secara nyata oleh masyarakat sebagaimana diungkapkan dalam wawancara dengan warga terdampak. Ketiga program ini mencerminkan pendekatan pemulihan yang tidak hanya bersifat reaktif terhadap bencana yang telah terjadi, tetapi juga sesuai prosedur dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap potensi bencana di masa mendatang. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *Build Back Better* yang menjadi prinsip utama dalam Dana Rekonstruksi Pasca-bencana, yaitu membangun kembali tidak hanya untuk mengembalikan kondisi semula, tetapi juga untuk membangun lebih aman, tahan bencana, dan berkelanjutan. Rasa aman yang dirasakan masyarakat untuk melakukan aktivitas keseharian merupakan indikator penting bahwa kapasitas adaptasi program telah berkontribusi pada pemulihan psikologis sekaligus pemulihan ekonomi masyarakat secara bersamaan, sebagaimana ditekankan oleh Steers (2013) bahwa adaptasi mencerminkan kapasitas institusional dalam mengelola risiko dan ketidakpastian yang muncul selama pelaksanaan kebijakan.

Kesimpulan

1. Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Pasca Bencana Banjir oleh Pemerintah Desa Balongga

Mekanisme penyaluran dana bantuan pasca bencana banjir bandang April 2024 di Desa Balongga berlangsung melalui lima tahapan utama yang bersifat bertahap dan melibatkan berbagai aktor kelembagaan secara vertikal, yaitu: (1) penetapan status keadaan darurat dan realokasi APBDes melalui musyawarah desa khusus; (2) pendataan korban secara langsung oleh Kepala Dusun dan aparat desa dengan sistem dua kriteria (kerusakan berat dan kerusakan ringan); (3) koordinasi lintas instansi yang mencakup Pemerintah Desa, Kecamatan, BPBD, Bappeda, dan Pemerintah Kabupaten dalam pola *multi-level governance*; (4) distribusi bantuan dalam bentuk paket logistik sembako yang bersumber dari APBD; serta (5) penanganan hambatan program pemulihan jangka panjang, khususnya program relokasi warga di zona merah yang hingga penelitian dilakukan belum terealisasi secara nyata.

Kesiapan fiskal pemerintah desa yang telah mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam APBDes sebelum bencana terjadi merupakan praktik baik yang sesuai dengan amanat regulasi. Namun demikian, mekanisme ini masih bersifat semi-partisipatif karena forum musyawarah lebih berfungsi sebagai legitimasi keputusan administratif dari pada ruang partisipasi substantif masyarakat.

2. Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Bencana Dalam Program Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pasca Banjir

Berdasarkan analisis menggunakan kerangka teori Efektivitas Steers (2013) yang mencakup tiga indikator utama, disimpulkan bahwa Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Bencana Dalam Program Pemulihan Ekonomi Masyarakat di Desa Balongga menunjukkan profil yang tidak seragam. Pertama, dari indikator pencapaian tujuan (*goal attainment*), program dinilai cukup efektif untuk pemenuhan kebutuhan logistik jangka pendek dan pemulihan lingkungan melalui normalisasi sungai dan penghijauan, namun belum efektif optimal untuk pemenuhan kebutuhan mendasar yang berkelanjutan, khususnya akses air bersih yang justru menjadi kebutuhan paling prioritas bagi masyarakat terdampak. Kedua, dari indikator integrasi (*integration*), koordinasi vertikal antar instansi pemerintah berjalan dengan cukup baik dan responsif pada fase tanggap darurat, namun integrasi horizontal antara pemerintah desa dengan masyarakat terdampak sangat lemah, bahkan ditemukan adanya ketegangan relasi ketika masyarakat berinisiatif mendirikan posko mandiri yang tidak mendapat dukungan kooperatif dari pemerintah desa. Ketiga, dari indikator adaptasi (*adaptation*), program menunjukkan kapasitas adaptif yang cukup baik, tercermin dari sinkronisasi kebijakan antara kecamatan dan lapangan, keterlibatan *Non-Governmental Organisation (NGO)* sebagai mitra eksternal dalam program pembibitan, serta pelaksanaan program fisik seperti pembangunan tanggul, penanaman pohon, dan sosialisasi kesiapsiagaan bencana yang dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.

Saran

Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan pendekatan longitudinal guna memantau perkembangan kondisi ekonomi masyarakat. Peneliti selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup penelitian dengan metode perbandingan (*comparative study*) antara beberapa desa yang terdampak bencana serupa di Kabupaten Sigi atau wilayah Sulawesi Tengah, agar dapat diidentifikasi faktor-faktor pembeda yang memengaruhi tingkat efektivitas pemulihan ekonomi di masing-masing desa secara lebih sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Y., Ningrum, M. V. R., & Setyasih, I. (2022). *Dampak bencana banjir terhadap ekonomi masyarakat di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)*, 9(1), 40-48.
- Asy'ari, Q. (2018). *Analisis dampak sosial ekonomi pasca bencana di Kabupaten Pamekasan: Studi kasus banjir, longsor dan kekeringan di Pamekasan 2007. J-MACC: Journal of Management and Accounting*, 1(2), 153-168.
- Ayub, S., Gunawan, G., & Harjono, A. (2020). *Gempa bumi dan mitigasi bencana. Jurnal Pendidikan Fisika dan Teknologi*.
- Carter W. Nick (2008) dalam *Disaster Management: A Disaster Manager's Handbook*
- Dethan, M. A. (2019). *Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD): Suatu pendekatan teoritis. Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 7(1), 15-28.
- Fadhilla, R. A., Kamilah, & Irham, M. (2024). *Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa. AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 38-47.

- Findayani, A., Kumalawati, R., & Pratomo, H. (2015). *Kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan banjir di Kota Semarang*. Jurnal Geografi.
- Fitriadi, F., Sriati, A., & Anna, A. (2017). *Konsep bencana dan penanggulangan bencana*. Jurnal Keperawatan Padjajaran.
- Fitriyanti, A., Saputra, D., & Hidayat, R. (2022). *Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan wisata*. Risma: Jurnal Riset Akuntansi dan
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H. (2010). *Organizations: Behavior, structure, processes (14th ed.)*. McGraw-Hill.
- Hakim, A. L., Setiawan, B., & Rahmat, A. (2022). *Pemulihan ekonomi pasca bencana untuk masyarakat pesisir Kabupaten Pandeglang*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara AsIAN, 3(2), 41-56.
- Hamid, R. S., Salju, S., Suharnita, S., Pelandira, P., Fadillah, N., Lusi, N., & Ruddin, D. R. (2021). *KKN kebencanaan: Desa tangguh bencana sebagai upaya pemulihan ekonomi dan kondisi sosial pasca banjir bandang*. Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(1), 306-312.
- Hapsoro, A. W., & Buchori, I. (2015). *Kajian kerentanan sosial dan ekonomi terhadap bencana banjir*. Jurnal Teknik PWK, 4(4), 542-553.
- Hidayat, R. (2020). *Kelompok rentan dalam bencana banjir*. [Jurnal/Penerbit].
- <https://diskominfo.sigikab.go.id/halaman/MTU5/MTI1MTA3/24234646-reaksi-cepat-pemprov-sultengpemkab-sigi-tangani-ko#>
- Islami, M. F., Pratama, R., & Hidayat, A. (2025). *Efektivitas program pemulihan infrastruktur pasca bencana: Studi kasus banjir bandang lahar dingin di Tanah Datar*. Jurnal Perencanaan Pembangunan, 9(1), 78-94.
- Kodoatie, R. J., & Sjarief, R. (2002). *Pengelolaan bencana terpadu: Banjir, longsor, kekeringan, dan tsunami*. Yarsif Watampone.
- Kusuma, A. (2023). *Pengelolaan dana bantuan bencana*. [Jurnal/Penerbit].
- Lukman Hakim. (2020). *Metode penelitian kualitatif*.
- Maghfirah, N., Rahman, K. G., & Marlinah, A. (2023). *Akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Pallangga Kabupaten Gowa*. Jurnal Manuver: Akuntansi dan Manajemen, 4(2), 156-173.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Maina, N., Subarkah, J., & Pravasanti, Y. A. (2022). *Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa se-Kecamatan Sambu Boyolali*. Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis, 1(2), 51-59.
- Mamuaja, J., Kawatu, F., & Kambey, A. (2021). *Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sea Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*. Jurnal Administrasi Publik, 2(2), 249-258.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik (Edisi terbaru)*. Penerbit Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Moeljono, D., & Kusumo, S. (2019). *Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa: Studi kasus pada desa di Kabupaten Demak*. Solusi: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi, 19(2), 49-64.

- Novita, D. (2016). *Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran dana desa tahun 2015 di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. Repository UIN Jakarta.
- Nur, S. W. (2021). *Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, 8(3), 725-739.
- Nurjanah, R., Sugiharto, R., Kuswanda, D., Siswanto, B. P., & Adikoesoemo, S. (2013). *Manajemen bencana*. Alfabeta.
- Pangalo, T., Rotinsulu, D. C., & Tumangkeng, S. Y. (2020). *Efektivitas pemanfaatan dana desa terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(3), 45-62.
- Priyono, A., et al. (2020). *Dampak ekonomi banjir terhadap infrastruktur*.
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). *Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat pada efektivitas pengelolaan dana desa*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 28(1), 132-158.
- Putra, R., et al. (2023). *Keanekaragaman hayati dan bencana banjir*.
- Rahman, R. A., Hakikah, Z., Putri, N. A., Aupiya, S., Mariana, A., Nafizatunni'am, & Misbahuddin, M. (2024). *Optimalisasi peran masyarakat dalam upaya mitigasi bencana untuk mewujudkan desa tangguh bencana di Desa Sukadana*. *Jurnal Wicara Desa*, 2(1), 21-31.
- Ramli, S. (2010). *Pedoman praktis manajemen bencana (disaster management)*. Dian Rakyat.
- Rasmiani, N. W. (2023). *Efektivitas pengelolaan keuangan pasca bencana alam di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 12(2), 178-195.
- Rasyid, F. (2022). *Metode penelitian kualitatif: Pendekatan fenomenologi*. Rajawali Pers.
- Robbins, S. P., Coulter, M., & DeCenzo, D. A. (2022). *Fundamentals of management (11th ed.)*. Pearson.
- Rochana, E., Puspawati, A. A., Karmilasari, V., & Wibisono, D. (2022). *Civil society (Indonesian Islamic Business Forum) dalam pemulihan ekonomi pasca bencana tsunami Selat Sunda*. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 13(2), 177-190.
- Rochmansjah, H. (2021). *Efektivitas alokasi dana desa dalam program pemulihan ekonomi masyarakat: Studi kasus Desa Citali Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang*. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 9(2), 156-174.
- Saputra, W., et al. (2021). *Peran pemerintah desa dalam pemulihan ekonomi*. [Jurnal].
- Sari, D., et al. (2018). *Dampak sosial banjir terhadap kesehatan masyarakat*. [Jurnal].
- Shaluf, I. M., Ahmadun, F., & Said, A. M. (2014). *A review of disaster and crisis management*. *Disaster Prevention and Management: An International Journal*, 12(1), 24-32.
- Steers, R. M. (1997). *Efektivitas organisasi* (Terjemahan Magdalena Jamin). Erlangga.
- Steers, R. M. (2013). *Organizational Effectiveness*. New York: McGraw-Hill.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung

- Sulistiyani, A. T. (2011). *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Gava Media.
- Suryono, A. (2001). *Teori dan isu pembangunan*. Universitas Negeri Malang Press.
- Susanto, A., et al. (2017). *Dampak lingkungan akibat banjir*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 *tentang Penanggulangan Bencana*.
- Vermiglio, C., et al. (2022). *Disaster management: Definition and approaches*. *International Journal of Disaster Risk Reduction*.
- Wiarto, G. (2017). *Tanggap bencana dan manajemen risiko*. Gosyen Publishing.
- Wibowo, S., et al. (2019). *Sektor pertanian terdampak banjir*